



Mengukur Efek 'Kota Dolar: Peran Pertumbuhan Ekonomi Dalam Memediasi Pengaruh Tingkat Harga Umum Dan Umk Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Kabupaten Mimika

Measuring the 'Dollar City' Effect: The Role of Economic Growth in Mediating the Impact of the General Price Level and the Minimum Wage on Income Inequality in Mimika Regency

Rahmi Ani¹, Edward Edy Teguach Sitinjak², Nadya Agista Talahatu³

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Institut Jambatan Bulan Timika, Jl. Hasanuddin – Mimika – Papua Tengah

***Corresponding Author: E-mail: rahmiani899@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Nov, 2025

Revised: 25 Dec, 2025

Accepted: 19 Jan, 2026

Kata Kunci:

Kota Dolar, Tingkat Harga Umum, UMK, Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Kabupaten Mimika

Keywords:

Dollar City, General Price Level, Minimum Wage, Economic Growth, Income Inequality, Mimika Regency

DOI: 10.56338/jks.v9i1.9923

ABSTRAK

Kabupaten Mimika, yang dijuluki sebagai "Kota Dolar" karena aktivitas pertambangan skala besar, menunjukkan paradoks antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tantangan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Tingkat Harga Umum dan Upah Minimum Kabupaten (UMK) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Mimika, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel mediasi. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis jalur (path analysis), penelitian ini mengevaluasi data sekunder periode tertentu untuk melihat frekuensi dan menggunakan data primer dari kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara langsung, UMK memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan, sementara Tingkat Harga Umum cenderung stabil. Secara tidak langsung, ditemukan bahwa Tingkat Harga Umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui Pertumbuhan Ekonomi ($P\text{-value } 0,089 > 0,05$). Sebaliknya, UMK terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan melalui mediasi Pertumbuhan Ekonomi ($P\text{-value } 0,019 < 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa jalur pertumbuhan ekonomi di "Kota Dolar" belum mampu menjadi penetral ketimpangan, melainkan justru memperlebar jurang pendapatan saat UMK naik. Pemerintah daerah perlu merancang strategi pertumbuhan inklusif untuk mengatasi transmisi negatif tersebut.

ABSTRACT

Mimika Regency, often dubbed the "Dollar City" due to its large-scale mining activities, presents a paradox between high economic growth and income inequality challenges. This study aims to analyze the influence of General Price

Levels and the Regency Minimum Wage (UMK) on Income Inequality in Mimika Regency, both directly and indirectly through Economic Growth as a mediating variable. Using a quantitative approach with path analysis, this research evaluates secondary data. The results show that directly, UMK has a significant impact on inequality, while the General Price Level remains relatively stable in its direct path. Indirectly, it was found that the General Price Level does not have a significant effect on Income Inequality through Economic Growth (P-value $0.089 > 0.05$). Conversely, UMK is proven to have a positive and significant effect on Income Inequality through the mediation of Economic Growth (P-value $0.019 < 0.05$). This indicates that the economic growth path in the "Dollar City" has not been able to neutralize inequality; instead, it widens the income gap as UMK increases. Local governments need to design inclusive growth strategies to address this negative transmission.

PENDAHULUAN

Kabupaten Mimika, yang sering dijuluki sebagai "Kota Dolar", menempati posisi unik dalam konstelasi ekonomi Indonesia. Julukan ini bukanlah tanpa alasan; kehadiran PT Freeport Indonesia sebagai salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia telah menjadikan Mimika sebagai mesin pertumbuhan ekonomi utama bagi Provinsi Papua dan kontributor signifikan bagi devisa negara. Aliran modal asing, intensitas aktivitas industri, dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang sangat tinggi menciptakan citra kemakmuran yang masif. Namun, di balik angka-angka pertumbuhan yang fantastis tersebut, tersimpan tantangan struktural yang kompleks mengenai bagaimana kemakmuran tersebut terdistribusi di antara penduduknya. Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah ketimpangan atau ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan.

Artinya, terdapat sebagian kecil masyarakat yang sangat kaya, dan sebagian besar hidup dalam kemiskinan. Idealnya, hasil dari kegiatan ekonomi (seperti produksi barang dan jasa) bisa dinikmati secara adil oleh seluruh masyarakat. Jika pendapatan dibagi secara merata, maka kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan meningkat. Sehingga dalam kenyataan, pembagian tidak selalu adil. Inilah yang disebut sebagai ketimpangan pendapatan.

Ketimpangan pendapatan tetap menjadi isu sentral di wilayah ini. Meskipun secara statistik pertumbuhan ekonomi Mimika seringkali berada di atas rata-rata nasional, manfaat dari pertumbuhan tersebut seringkali terjebak dalam "sektor enklave" sebuah kondisi di mana kekayaan hanya berputar di sekitar industri ekstraktif dan tidak merembes secara optimal ke sektor ekonomi rakyat. Fenomena ini menciptakan jurang pemisah yang lebar antara pekerja di sektor formal (pertambangan) dengan masyarakat yang bergerak di sektor informal atau tradisional.

Ketimpangan pada hakikatnya terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Oleh sebab itu, masing-masing daerah memiliki kemampuan dalam mendorong proses pembangunan yang berbeda-beda. Dari sini lah tercipta istilah wilayah maju (developed region) dan wilayah terbelakang (undeveloped region). Ketimpangan antarwilayah ini memiliki pengaruh pada kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah (Syafrizal, 2022).

Ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional diantara masyarakat. Sedangkan pengertian lain, ketimpangan pendapatan merupakan perbedaan kemakmuran dalam perekonomian antara yang kaya dengan yang miskin. Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah adalah adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Nengsih, 2023).

Rasio Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berada pada rentang 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Dalam penelitian ini,

data Rasio Gini Kabupaten Timika periode 2020–2024 digunakan untuk menggambarkan dinamika ketimpangan pendapatan daerah. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan disajikan pada tabel berikut.



Gambar 1. Upah Minimum di Kabupaten Mimika

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data Rasio Gini Kabupaten Timika Tahun 2020–2024, terlihat bahwa tingkat ketimpangan pendapatan mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2020, Rasio Gini tercatat sebesar 0,339 dan mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 0,349. Kenaikan ini menunjukkan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan pada periode tersebut. Pada tahun 2022, Rasio Gini mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,297, yang mengindikasikan membaiknya pemerataan pendapatan. Namun, pada tahun 2023 Rasio Gini kembali meningkat menjadi 0,344, dan pada tahun 2024 naik lebih lanjut menjadi 0,350. Peningkatan ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan kembali melebar dalam dua tahun terakhir.

Secara umum, perkembangan Rasio Gini Kabupaten Timika menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada akhir periode pengamatan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum sepenuhnya diikuti oleh pemerataan pendapatan, sehingga ketimpangan tetap menjadi isu penting dalam pembangunan ekonomi daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama untuk menggambarkan kinerja dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB mencerminkan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Dalam penelitian ini, data PDRB Kabupaten Mimika periode 2020–2024 digunakan untuk menggambarkan dinamika pertumbuhan ekonomi daerah. Data tersebut disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Mimika

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Mimika Tahun 2020–2024, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB tercatat sebesar 11,44 persen. Angka ini kemudian meningkat tajam pada tahun 2021 menjadi 36,85 persen, yang menunjukkan adanya lonjakan aktivitas ekonomi pada periode tersebut. Pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB mengalami penurunan menjadi 15,31 persen, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Selanjutnya, pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kembali melambat menjadi 7,9 persen. Pada tahun 2024, PDRB Kabupaten Mimika menunjukkan peningkatan kembali dengan pertumbuhan sebesar 13,96 persen.

Secara umum, perkembangan PDRB Kabupaten Mimika selama periode penelitian menunjukkan pola pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh dinamika sektor-sektor utama, sehingga diperlukan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Mengingat struktur PDRB Mimika yang bergantung pada sektor ekstraktif, terdapat keterkaitan erat antara produktivitas sektoral dengan kemampuan daerah dalam menetapkan standar upah. Kebijakan UMK di sini bertindak sebagai alat untuk menyelaraskan antara capaian pertumbuhan ekonomi makro dengan peningkatan kesejahteraan riil pekerja di tingkat mikro.

Upah Minimum Kabupaten (UMK) merupakan indikator kebijakan pengupahan yang mencerminkan kondisi ketenagakerjaan dan tingkat kesejahteraan pekerja di suatu daerah. Dalam penelitian ini, data UMK Kabupaten Mimika periode 2020–2024 digunakan untuk menggambarkan perkembangan kebijakan pengupahan daerah. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika dan disajikan pada tabel berikut.



Gambar 3. Upah Minimum di Kabupaten Mimika

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data UMK Kabupaten Mimika Tahun 2020–2024, terlihat bahwa penetapan UMK tidak mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2020 dan 2021, UMK Kabupaten Mimika ditetapkan sebesar Rp3.958.444. Kondisi ini menunjukkan adanya kebijakan pengupahan yang bersifat stabil di tengah tekanan ekonomi pada periode tersebut. Pada tahun 2022, UMK mengalami kenaikan menjadi Rp4.052.776, yang mengindikasikan adanya penyesuaian terhadap kondisi ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2023, UMK kembali tidak mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sama. Kenaikan UMK yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2024, di mana UMK meningkat menjadi Rp4.512.077.

Secara umum, perkembangan UMK Kabupaten Mimika selama periode penelitian menunjukkan adanya pola penyesuaian yang bertahap dan selektif. Perubahan UMK ini berpotensi memengaruhi biaya tenaga kerja bagi pelaku usaha serta tingkat kesejahteraan pekerja, sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks kebijakan ekonomi daerah.

Tingkat harga umum merupakan determinan utama dalam penentuan nominal UMK. Kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) yang terjadi secara terus-menerus akan menggerus nilai riil pendapatan pekerja. Oleh karena itu, penyesuaian UMK berfungsi sebagai mekanisme kompensasi untuk mempertahankan daya beli riil (*real purchasing power*) pekerja agar tidak merosot di tengah tekanan inflasi daerah.

Tingkat Harga Umum (THU) merupakan indikator yang mencerminkan perubahan harga barang dan jasa secara umum di suatu wilayah, yang umumnya diukur melalui tingkat inflasi. Perubahan THU berpengaruh langsung terhadap daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi daerah. Dalam penelitian ini, data THU Kabupaten Mimika periode 2020–2024 dihitung berdasarkan data inflasi dan digunakan untuk menggambarkan dinamika harga di tingkat daerah. Data tersebut disajikan pada tabel berikut.



Gambar 4. Upah Minimum di Kabupaten Mimika

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2025

Berdasarkan data THU Kabupaten Mimika Tahun 2020–2024, terlihat bahwa tingkat inflasi mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Pada tahun 2020, inflasi tercatat sebesar 0,98 persen dan meningkat menjadi 1,19 persen pada tahun 2021. Nilai inflasi yang relatif rendah pada periode ini menunjukkan kondisi harga yang masih stabil.

Pada tahun 2022, inflasi meningkat secara signifikan menjadi 6,51 persen, yang mencerminkan adanya tekanan kenaikan harga barang dan jasa. Selanjutnya, pada tahun 2023, inflasi menurun menjadi 3,86 persen, dan kembali menurun pada tahun 2024 menjadi 3,17 persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya upaya pengendalian harga di tingkat daerah.

Secara umum, perkembangan THU Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa stabilitas harga sempat terganggu pada tahun 2022, namun kembali terkendali pada periode berikutnya. Kondisi ini berimplikasi pada perubahan daya beli masyarakat dan menjadi faktor penting dalam analisis ekonomi daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan kuesioner. Data yang dikumpulkan berasal dari periode 2020 hingga 2024 dan data dari 45 responden. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain analisis jalur untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Tingkat harga Umum (THU) dan Upah Minimum Kabupaten, sedangkan variabel dependen meliputi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan. Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis jalur dengan dan alat analisis yang digunakan adalah SEM-PLS. Melalui analisis jalur ini, penelitian bertujuan untuk menguji Apakah Tingkat harga Umum (THU) dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan.

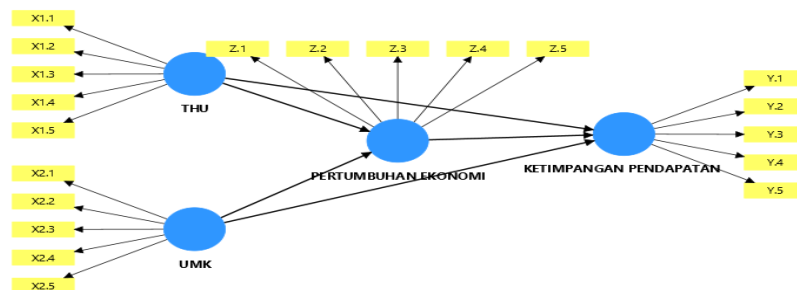
HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui pengaruh Tingkat harga Umum (THU) dan Upah Minimum Kabupaten, terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten Mimika dengan metode yang digunakan yaitu metode asosiatif untuk mengetahui pengaruh dengan alat analisis yaitu PLS-SEM. Adapun berikut data yang mendukung analisis seperti berikut:

Tabel 1. Karakteristik Sosial - Ekonomi responden

Karakteristik	Kategori	Frekuensi	Persentase
Pekerjaan	Pekerja Sektor Formal (PNS, BUMN/BUMD, Perusahaan Swasta)	12	27%
	Pekerja Sektor Informal (Pedagang, Tukang Ojek, Petani, Nelayan, dll.)	17	38%
	Karyawan di Sektor Pertambangan/Perusahaan Penunjang	6	13%
	Mahasiswa	8	18%
	IRT	2	4%
Penghasilan	<Rp2jt	13	29%
	Rp2jt -- Rp3jt	15	33%
	Rp4jt -- Rp5jt	8	18%
	Rp6jt -- Rp9jt	6	13%
	>Rp10jt	3	7%
Tanggungan	Tidak ada	3	7%
	1 orang	6	13%
	2 orang	10	22%
	3 orang	8	18%
	4 orang	12	27%
	5 orang	2	5%
	6 orang	2	4%
	7 orang	1	2%
	12 orang	1	2%

Konseptual model dalam analisis PLS-SEM ini penulis membangun model dengan teori yang telah di bahas pada konsep teori dengan pembentukan model sebagai berikut:



Gambar 5. Diagram Jalur Tingkat Harga Umum, Upah Minimum Kabupaten, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Gambar 5 menjelaskan hubungan indikator dengan variabel latin eksogen, antara lain variabel Tingkat Harga umum (THU) (X1) terdiri dari indikator perbandingan harga (X1_1), laju kenaikan harga (X1_2), beban biaya angkut (X1_3), daya beli sekunder (X1_4), dan kepastian harga (X1_5). Variabel Upah Minimum Kabupaten (X2) terdiri dari indikator standar nilai upah (X2_1), kesesuaian kenaikan upah (X2_2), kecukupan kebutuhan dasar (X2_3), daya tarik kerja (X2_4), dan cakupan upah sektoral (X2_5). Sedangkan Variabel latin endogen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (Z) terdiri dari indikator peningkatan unit usaha (Z_1), manfaat infrastruktur (Z_2), dampak sektor tambang (Z_3), kemudahan peluang kerja (Z_4), dan pemerataan ekonomi (Z_5). dan variabel Ketimpangan Pendapatan (Y) terdiri dari indikator perbedaan gaji sektoral (Y_1), kecepatan akumulasi kekayaan (Y_2), akses fasilitas eksklusif (Y_3), dominasi keuntungan ekonomi (Y_4), dan hambatan naik kelas (Y_5).

Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

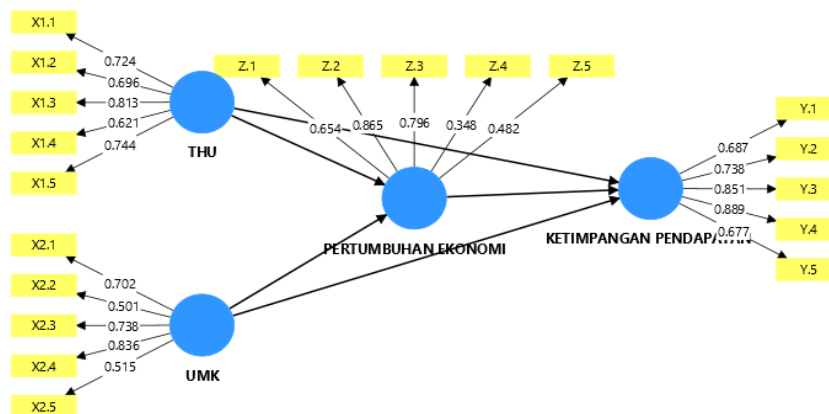
Uji Validitas Konstruktif

konstruktif menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukuran sesuai teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk (Hartono dalam Abdillah dan Jogiyo, 2021:194). Validitas konstruk terdiri dari validitas konvergen dan validitas diskriminan.

a. Uji validitas konvergen

Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrument yang berbeda mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi (Hartono dalam Abdillah dan Jogiyo, 2021:195).

Menurut Ghazali (2015:37), convergent validity dari measurement model dengan indikator reflektif dapat dilihat dari korelasi antara skor indikator dengan skor konstruknya. Indikator individu dianggap reliabel jika memiliki nilai loading faktor di atas 0,70, jika lebih kecil dari nilai loading faktor maka indikator di hapus. Berikut hasil uji korelasi antara skor indikator dengan skor konstruknya:



Gambar 6. Hubungan antara Indikator dengan Variabel

Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil uji pada gambar 6, terdapat beberapa indikator yang nilainya lebih kecil dari nilai *loading* faktor, hal ini dapat dijelaskan dengan tabel sebagai berikut:

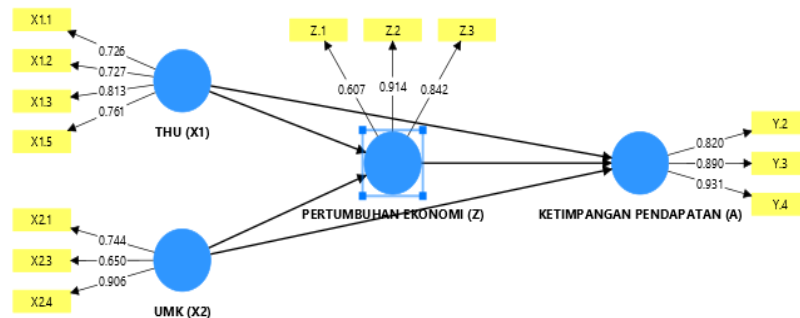
Tabel 2. Hubungan Antara Skor Indikator Dengan Variabel

Variabel Dan Indikator	X1	X2	Z	Y
X1_1	0,724			
X1_2	0,696			
X1_3	0,813			
X1_4	0,621			
X1_5	0,744			

X2_1	0,702		
X2_2	0,501		
X2_3	0,738		
X2_4	0,836		
X2_5	0,515		
Z_1		0,654	
Z_2		0,865	
Z_3		0,796	
Z_4		0,348	
Z_5		0,482	
Y_1			0,687
Y_2			0,738
Y_3			0,851
Y_4			0,889
Y_5			0,677

X1_1 : Perbandingan harga	Z_1 : Peningkatan unit usaha
X1_2 : Laju kenaikan harga	Z_2 : Manfaat infrastruktur
X1_3 : Beban biaya angkut	Z_3 : Dampak sektor tambang
X1_4 : Daya beli sekunder	Z_4 : Kemudahan peluang kerja
X1_5 : Kepastian harga	Z_5 : Pemerataan ekonomi
X2_1 : standar nilai upah	Y_1 : Perbedaan gaji sektoral
X2_2 : kenaikan upah	Y_2 : Kecepatan akumulasi kekayaan
X2_3 : kecukupan kebutuhan dasar	Y_3 : Akses fasilitas eksklusif
X2_4 : daya tarik kerja	Y_4 : Dominasi keuntungan ekonomi
X2_5 : cakupan upah sektoral	Y_5 : Hambatan naik kelas

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai indikator X1_2, X1_4, X2_2, X2_5, Z_1, Z_4, Z_5, Y_1 dan Y_5 memiliki nilai loading faktor lebih kecil dari 0,7 maka beberapa indikator tersebut dikeluarkan karena tidak memiliki nilai hubungan terhadap variabel maka dilakukan uji kembali. Berikut hasil uji kembali keseluruhan indikator dan konstruknya:



Gambar 7. Hasil Uji Kembali Indikator dan Kontruknya
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Gambar 7 setelah dikeluarkan indikator X1_4, X2_2, X2_5, Z_4, Z_5, Y_1 dan Y_5 dan dilakukan pengujian kembali, hasil uji menunjukkan nilai keseluruhan indikator mempunyai hubungan dengan konstruknya, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

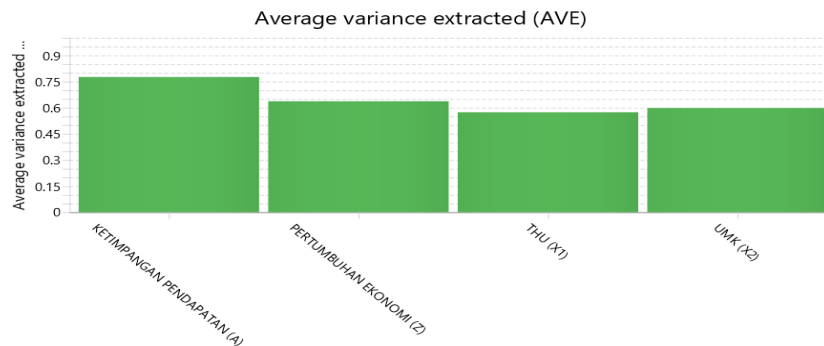
Tabel 3. Hubungan antara Skor Indikator dan Skor Kontruk Setelah Dilakukan Pengujian Kembali

Variabel Dan Indikator	X1	X2	Z	Y
X1_1	0,726			
X1_2	0,727			
X1_3	0,813			
X1_5	0,761			

X2_1	0,744		
X2_3	0,650		
X2_4	0,906		
Z_1		0,607	
Z_2		0,914	
Z_3		0,842	
Y_2			0,820
Y_3			0,890
Y_4			0,931

X1_1 : Perbandingan harga	Z_1 : Peningkatan unit usaha
X1_2 : Laju kenaikan harga	Z_2 : Manfaat infrastruktur
X1_3 : Beban biaya angkut	Z_3 : Dampak sektor tambang
X1_5 : Kepastian harga	Y_2 : Kecepatan akumulasi kekayaan
X2_1 : standar nilai upah	Y_3 : Akses fasilitas eksklusif
X2_3 : kecukupan kebutuhan dasar	Y_4 : Dominasi keuntungan ekonomi
X2_4 : daya tarik kerja	

Hasil uji menunjukkan bahwa hubungan antar indikator dengan kontruknya lebih besar dari nilai loading faktor 0,70 sehingga hasil uji telah memenuhi convergent validity dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya Tetapi beberapa indikator tetap dipertahankan walau dibawah 0,7 karena Menurut Hair et al. (2017), indikator dengan outer loading antara 0,40 hingga 0,70 tidak harus langsung dihapus. Anda hanya boleh menghapusnya jika Penghapusan indikator tersebut terbukti meningkatkan nilai Average Variance Extracted (AVE) menjadi >0,50. Dan Penghapusan tersebut meningkatkan Composite Reliability (CR) di atas ambang batas 0,70.



Gambar 8. Hasil Uji Kembali Average Variance Extracted (AVE)
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil Uji kembali menunjukkan terbukti meningkatkan nilai Average Variance Extracted (AVE) menjadi >0,50.

b. Validitas Discriminan

Validitas diskriman berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-pengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Validitas diskriminan terjadi jika dua instrumen yang berbeda mengukur dua konstruk yang diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak berkorelasi (Hartono dalam Abdillah dan Jogiyanto, 2021:195).

Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan cross loading pengukuran dengan konstruknya dengan pengukuran nilai cross loading untuk setiap variabel lebih dari 0,70.

Berikut hasil uji validitas diskriminan dapat dilihat pada tabel bias silang (cross loading):

Tabel 4. Hasil Uji Bias Silang Antar Konstruk

Variabel Dan Indikator	X1	X2	Z	Y
X1_1	0,726	0.399	0.370	0.417
X1_2	0,727	0.190	0.362	0.301

X1_3	0,813	0.380	0.429	0.697
X1_5	0,761	0.225	0.382	0.347
X2_1	0.255	0,744	0.463	0.341
X2_3	0.153	0,650	0.351	0.163
X2_4	0.453	0,906	0.731	0.502
Z_1	0.448	0.398	0,607	0.375
Z_2	0.586	0.320	0,914	0.536
Z_3	0.603	0.528	0,842	0.544
Y_2	0.440	0.455	0.549	0,820
Y_3	0.492	0.648	0.489	0,890
Y_4	0.299	0.576	0.585	0,931

X1_1 : Perbandingan harga	Z_1 : Peningkatan unit usaha
X1_2 : Laju kenaikan harga	Z_2 : Manfaat infrastruktur
X1_3 : Beban biaya angkut	Z_3 : Dampak sektor tambang
X1_5 : Kepastian harga	Y_2 : Kecepatan akumulasi kekayaan
X2_1 : standar nilai upah	Y_3 : Akses fasilitas eksklusif
X2_3 : kecukupan kebutuhan dasar	Y_4 : Dominasi keuntungan ekonomi
X2_4 : daya tarik kerja	

Hasil uji menunjukkan bahwa keseluruhan korelasi antara variabel dengan indikatornya nilainya lebih besar dari 0,70 dibandingkan dengan korelasi variabel diluar dari indikator lain nilainya lebih kecil dari 0,70 terdapat diskriminan validitas.

c. Uji Reabilitas Konstruk

Uji Reabilitas dapat diukur dengan dua kriteria yaitu composite reliability dan Cronbach alpha dari blok indikator yang mengukur konstruk. Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *composite reliability* dan *cronbach alpha* lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2015:41). Adapun Konstruk dinyatakan reliabel jika nilai *cronbach alpha* lebih besar dari 0,60. (Budhiasa, 2016:15).

Berikut hasil uji reabilitas konstruk dilihat dari tabel composite reliability dan Cronbach alpha:

Tabel 5. Uji Reabilitas Konstruk

Variabel	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Composite reliability (rho_c)
X1	0.760	0.795	0.843
X2	0.674	0.797	0.815
Y	0.855	0.866	0.912
Z	0.698	0.736	0.837

X1 : Tingkat Harga Umum

X2 : Upah Minimum Kabupaten

Y : Ketimpangan Pendapatan

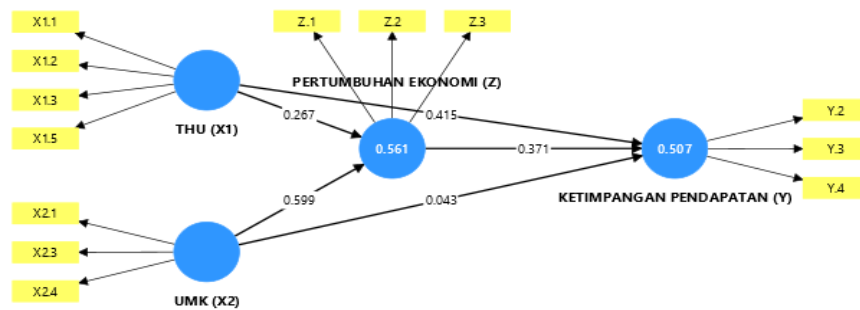
Z : Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji reliabilitas tabel 5, dengan metode *Cronbach Alpha* dengan keseluruhan variabel X, Y dan variabel Z memiliki nilai lebih besar dari 0,60, begitu juga untuk metode *Composite Reliability* dengan nilai lebih besar dari nilai 0,70 menunjukkan keseluruhan variabel dikatakan reliabel atau variabel X1, dan X2, mempunyai hubungan linier dengan variabel Y dan Z dan dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Analisis Hubungan Variabel

Pengujian model struktural dilakukan untuk memprediksi hubungan sebab akibat (kausalitas) antar variabel atau pengujian hipotesis (Abdillah dan Jogiyanto, 2021:208). Pengujian terhadap model struktural dilakukan dengan melihat nilai R-square yang merupakan uji goodness-fit model. Nilai R-square 0,75 menunjukkan model kuat, Nilai R-square 0,50 menunjukkan model moderat, dan Nilai R-square 0,25 menunjukkan model lemah (Hair et al dalam Ghozali, 2015:81). Berikut hasil analisis evaluasi model hubungan variabel pada gambar berikut:



Gambar 9. Evaluasi Model Hubungan Variabel
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Hasil analisis pada gambar 9, evaluasi model hubungan variabel X1, X2, terhadap Z dan Y dengan kategori “moderate”, dapat gambarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Reabilitas Konstruk

Variabel	R-square	R-square adjusted
Y	0.507	0.471
Z	0.561	0.541

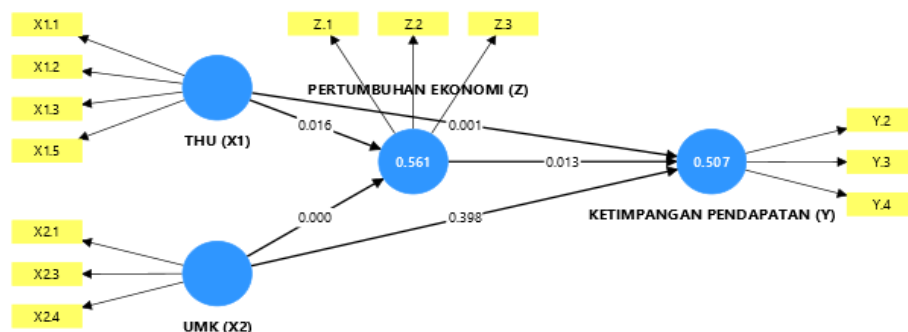
Y : Ketimpangan Pendapatan

Z : Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil analisis diperoleh *R-square* sebesar 0,507 untuk variabel Ketimpangan Pendapatan menunjukkan bahwa 50,7% variasi pada variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara 49,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, sehingga hubungan antara variabel independen dan Ketimpangan Pendapatan dapat dianggap sedang. Sementara itu, nilai *R-square* sebesar 0,561 untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan bahwa 56,1% variasi pada variabel ini dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model, sementara 43,9% dipengaruhi oleh faktor eksternal. Nilai ini menunjukkan hubungan yang cukup sedang, artinya model mampu menjelaskan sebagian besar faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi.

Analisis pengaruh Parsial Variabel (*Direct Effect*)

Menurut Hartono (Abdillah dan Jogiyanto, 2021:211), ukuran signifikansi keterdukungan hipotesis dapat digunakan perbandingan nilai T-tabel dan T-statistik. Jika nilai T-statistik lebih besar dibandingkan nilai T-tabel, berarti hipotesis terdukung. Untuk tingkat keyakinan 95 persen (alpha 5 persen) maka nilai T-tabel two tailed adalah lebih besar sama dengan 1,96. Dengan hasil analisis sebagai berikut:



Gambar 10. Analisis Pengaruh Variabel
Sumber: Pengolahan Data Primer, 2025

Gambar 10, hasil analisis menunjukkan terdapat pengaruh antara variabel X1, terhadap variabel Z dan variabel Y, variabel X2 terhadap variabel Z, dan variabel Z terhadap variabel Y. sedangkan pada variabel X2 terhadap variabel Y menunjukkan tidak adanya pengaruh dimana dijelaskan oleh nilai T-statistik lebih kecil dari nilai T-tabel dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Analisis Pengaruh Variabel

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
Z → Y	0.371	0.364	0.168	2.213	0.013
X1 → Y	0.415	0.440	0.131	3.165	0.001
X1 → Z	0.267	0.272	0.124	2.155	0.016
X2 → Y	0.043	0.059	0.165	0.259	0.398
X2 → Z	0.599	0.597	0.121	4.936	0.000

X1 : Tingkat Harga Umum

X2 : Upah Minimum Kabupaten

Y : Ketimpangan Pendapatan

Z : Pertumbuhan Ekonomi

Dari tabel 7, hasil analisis menunjukkan bahwa besaran koefisien parameter (original sampel) dari keseluruhan variabel X1 dengan Y dan Z, X2 dengan Z, dan Z dengan Y mempunyai nilai positif dan nilai T-statistik lebih besar dari nilai T-tabel 1,96 dan memiliki nilai P-value <0,5 dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa variabel Tingkat Harga Umum(X1) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Ketimpangan Pendapatan (Y) dan Variabel Pertumbuhan Penduduk (Z), variabel Upah Minimum Kabupaten (X2) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y), variabel Upah Minimum Kabupaten (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan (Z), dan Pertumbuhan Ekonomi (Z) berpengaruh positif signifikan terhadap penyerapan Ketimpangan Pendapatan (Y).

Analisis pengaruh variabel mediasi (*Indirect Effect*)

Variabel mediasi (atau sering disebut variabel *intervening*) adalah variabel perantara yang secara teoritis menghubungkan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Menurut Ghazali (2021), mediasi terjadi jika variabel independen mampu memengaruhi variabel dependen melalui variabel antara. Dalam konteks Kabupaten Mimika, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi menjalankan peran mediasi dalam hubungan antara THU dan UMK terhadap ketimpangan pendapatan. dengan penjelasan pada tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Analisis Pengaruh Variabel Tidak Langsung

Variabel	Original sample (O)	Sample mean (M)	Standard deviation (STDEV)	T statistics (O/STDEV)	P values
X1 → Z → Y	0.099	0.103	0.074	1.346	0.089
X2 → Z → Y	0.222	0.214	0.107	2.074	0.019

X1 : Tingkat Harga Umum

X2 : Upah Minimum Kabupaten

Y : Ketimpangan Pendapatan

Dari tabel 8, hasil analisis menunjukkan bahwa besaran koefisien parameter (original sampel) dari keseluruhan variabel X2 dengan Y melalui Z mempunyai nilai positif dan nilai T-statistik lebih besar dari nilai T-tabel 1,96 dan memiliki nilai P-value <0,5, sedangkan, X1 dengan Y melalui Z mempunyai nilai positif dan tetapi nilai T-statistik lebih kecil dari nilai T-tabel 1,96 dan memiliki nilai P-value >0,5 tidak memenuhi **0,05** (taraf signifikansi 5%).

Pengaruh Secara Langsung

Berdasarkan hasil analisis dan persamaan di atas, dapat dijelaskan pengaruh langsung sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Harga Umum sebagai Pemicu Pelebaran Ketimpangan Pendapatan
Berdasarkan hasil analisis jalur, koefisien pengaruh Tingkat Harga Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan sebesar **0,415** dan bersifat positif. Nilai **T-statistik 3,165** ($>1,96$) serta **P-value 0,001** ($<0,05$) menunjukkan bahwa pengaruh ini signifikan secara statistik. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan harga barang dan jasa di Kabupaten Mimika lebih cepat menekan kelompok berpendapatan rendah dibandingkan kelompok berpendapatan tinggi. Akibatnya, disparitas pendapatan antar kelompok masyarakat semakin melebar. Dengan demikian, inflasi daerah terbukti menjadi faktor penting yang secara langsung memperkuat ketimpangan pendapatan.
2. Pengaruh Tingkat Harga Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika
Hasil estimasi menunjukkan bahwa Tingkat Harga Umum memiliki koefisien pengaruh sebesar **0,267** terhadap Pertumbuhan Ekonomi, dengan **T-statistik 2,155** dan **P-value 0,016**, yang berarti signifikan secara statistik. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat harga di Mimika berjalan seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, terutama yang didorong oleh sektor unggulan daerah seperti pertambangan dan jasa pendukungnya. Oleh karena itu, dinamika harga tidak hanya mencerminkan tekanan biaya, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Koefisien pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Pertumbuhan Ekonomi tercatat sebesar **0,599**, dengan **T-statistik 4,936** dan **P-value 0,000**. Nilai ini menunjukkan hubungan yang positif dan sangat signifikan. Peningkatan UMK berkontribusi pada naiknya pendapatan pekerja, yang selanjutnya mendorong konsumsi rumah tangga dan memperluas permintaan agregat. Efek ini kemudian memicu peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, kebijakan UMK berperan strategis sebagai instrumen penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten terhadap Ketimpangan Pendapatan
Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh langsung UMK terhadap Ketimpangan Pendapatan memiliki koefisien **0,043**, dengan **T-statistik 0,259** dan **P-value 0,398**, sehingga dinyatakan tidak signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa kenaikan UMK belum mampu secara langsung memperbaiki distribusi pendapatan. Hal ini dipengaruhi oleh dominasi sektor informal serta ketimpangan struktur pasar tenaga kerja di Kabupaten Mimika. Dengan demikian, kebijakan UMK memerlukan dukungan kebijakan lain agar dapat berfungsi sebagai alat pengurang ketimpangan pendapatan.
5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan
Koefisien pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan sebesar **0,371**, dengan **T-statistik 2,213** dan **P-value 0,013**, menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika belum sepenuhnya dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Pertumbuhan yang terkonsentrasi pada sektor tertentu justru memperbesar kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi cenderung bersifat eksklusif dan berimplikasi pada peningkatan ketimpangan pendapatan.

Pengaruh Secara Tidak Langsung

Berdasarkan hasil analisis dan persamaan di atas, dapat dijelaskan pengaruh tidak langsung sebagai berikut:

1. Pengaruh Tingkat Harga Umum (THU) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi
Berdasarkan perhitungan, hasil nilainya adalah 0,099. Angka positif ini menunjukkan bahwa secara teoritis, setiap kenaikan Tingkat Harga Umum (X1) cenderung diikuti oleh kenaikan Ketimpangan Pendapatan (Y) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Z). Namun, kekuatan pengaruh ini sangat kecil. Nilai T-statistik yang didapat adalah 1,346. Dalam standar statistik (tingkat kepercayaan 95%),

sebuah hubungan dinyatakan signifikan jika nilai T-statistik $> 1,96$. Karena $1,346 < 1,96$, maka hubungan ini dinyatakan tidak signifikan. Nilai Peluang (P-Value): Nilainya adalah 0,089. Nilai ini lebih besar dari ambang batas standar 0,05. Maka, disimpulkan bahwa Tingkat Harga Umum (X1) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y) jika dimediasi oleh Pertumbuhan Ekonomi (Z). Artinya, perubahan pada tingkat harga tidak secara otomatis atau tidak cukup kuat untuk memengaruhi ketimpangan pendapatan melalui jalur mediator tersebut.

2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten (UMK) Terhadap Ketimpangan Pendapatan Melalui Pertumbuhan Ekonomi

Nilainya adalah 0,222. Ini menunjukkan hubungan positif yang cukup kuat. Artinya, kenaikan Upah Minimum Kabupaten (X2) yang melewati Pertumbuhan Ekonomi (Z) berkontribusi terhadap peningkatan Ketimpangan Pendapatan (Y). dengan Nilai T-statistik yang didapat adalah 2,074. Karena nilai ini lebih besar dari 1,96, maka hubungan ini dinyatakan signifikan secara statistik. dimana nilai Peluang (P-Value): Nilainya adalah 0,019 (ditandai dengan warna hijau). Nilai ini jauh di bawah ambang batas 0,05, yang memperkuat bukti bahwa hubungan ini nyata dan bukan karena faktor kebetulan. maka dapat disimpulkan, Upah Minimum Kabupaten (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y) melalui variabel Pertumbuhan Ekonomi (Z). Ini berarti Pertumbuhan Ekonomi berhasil menjalankan fungsinya sebagai jembatan (mediator) yang menghubungkan kebijakan upah minimum dengan kondisi ketimpangan pendapatan di daerah tersebut.

3. Pengaruh Dinamika Harga sebagai Jalur Tidak Langsung terhadap Ketimpangan melalui Pertumbuhan Ekonomi

Koefisien pengaruh tidak langsung Tingkat Harga Umum (X1) terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Z) sebesar **0,099** dan bertanda positif. Nilai **T-statistik 1,346 ($< 1,96$)** serta **P-value 0,089 ($> 0,05$)** menunjukkan bahwa pengaruh ini **tidak signifikan secara statistik**. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun Tingkat Harga Umum memengaruhi pertumbuhan ekonomi, mekanisme tersebut belum cukup kuat untuk mentransmisikan dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi belum mampu menjadi mediator efektif dalam hubungan antara inflasi dan ketimpangan pendapatan.

4. Pengaruh Peran Pertumbuhan Ekonomi sebagai Mediator Kebijakan Upah Minimum terhadap Ketimpangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung Upah Minimum Kabupaten (X2) terhadap Ketimpangan Pendapatan (Y) melalui Pertumbuhan Ekonomi (Z) memiliki koefisien sebesar **0,222**, dengan **T-statistik 2,074 ($> 1,96$)** dan **P-value 0,019 ($< 0,05$)**. Hasil ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi **berhasil berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan**. Kenaikan UMK mendorong pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan tersebut belum bersifat inklusif sehingga berdampak pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, kebijakan upah minimum memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi.

5. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi sebagai Saluran Tidak Langsung Akumulasi Pendapatan

Signifikannya pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan memperkuat temuan bahwa pertumbuhan ekonomi berfungsi sebagai saluran akumulasi pendapatan kelompok tertentu. Dalam konteks Kabupaten Mimika, pertumbuhan ekonomi yang ditopang sektor ekstraktif cenderung dinikmati oleh pekerja formal dan pemilik modal. Kondisi ini menyebabkan manfaat pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata, sehingga secara tidak langsung memperlebar ketimpangan pendapatan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi berperan sebagai mediator struktural yang memperkuat ketimpangan pendapatan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian dengan pendekatan SEM-PLS menunjukkan bahwa **Tingkat Harga Umum (THU)** dan **Upah Minimum Kabupaten (UMK)** memiliki peran penting dalam memengaruhi **Pertumbuhan Ekonomi** dan **Ketimpangan Pendapatan** di Kabupaten Mimika. THU berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan serta pertumbuhan ekonomi, yang mengindikasikan bahwa kenaikan harga mendorong aktivitas ekonomi namun sekaligus memperlebar kesenjangan pendapatan. UMK terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap ketimpangan pendapatan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, yang menunjukkan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum bersifat inklusif. Dari sisi pengaruh tidak langsung, THU tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan UMK memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan melalui pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika perlu diiringi dengan kebijakan pemerataan agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Asrofillah M., F., Arimurti R., (2024). Hubungan Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan (Studi Kasus :Provinsi Riau). Seminar Nasional Industri dan Teknologi (SNIT), Politeknik Negeri Bengkalis. <https://intechbiz.polbeng.ac.id/eprosiding/index.php/snit/article/view/660/469>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Kabupaten Mimika dalam Angka 2023. Timika: BPS Kabupaten Mimika.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Mimika dalam Angka 2024. Timika: BPS Kabupaten Mimika.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Mimika. Timika: BPS Kabupaten Mimika.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Upah dan Pendapatan Kabupaten Mimika. Timika: BPS Kabupaten Mimika.
- Badan Pusat Statistik. (2024). Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Mimika Menurut Lapangan Usaha. Timika: BPS Kabupaten Mimika.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Inflasi dan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Mimika. Timika: BPS Kabupaten Mimika.
- Darmuji Darmuji, Tuti Alawiyah, and Khuswatun Hasanah, Dampak Kualitas Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Ekonomi: Sebuah Analisis, Jurnal Pendidikan Indonesia, vol. 5, 2024, <https://doi.org/10.59141/japendi.v5i8.3183>
- Ghozali, I. (2021). *Structural Equation Modeling: Metode Alternatif dengan Partial Least Squares (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jamaluddin, M. A., Santoso, A. S. P., & Ohoirenan, W. A. (2025). Peran Tingkat Kemiskinan Dalam Memediasi Pengaruh Upah Minimum, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 37-52. <https://j-economics.my.id/index.php/home/article/view/422/391>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan RI.
- Nesha Rizky Ashari et al., “Pengaruh Pendidikan, Pengangguran, Dan Kemiskinan Terhadap Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia,” Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 13, no. 2 (December 23, 2024): 299, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v13i2.25139>

- Santoso, P. B. (2016). Impact of Economic Growth, Inflation and Minimum Wage on Poverty in Java. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 1-12. <https://www.neliti.com/publications/504420/impact-of-economic-growth-inflation-and-minimum-wage-on-poverty-in-java>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development (12th ed.)*. New York: Pearson Education.